



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISTI WIDAYANTI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 143892

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.941.545.750

1. Tanah Seluas 1038 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 142.500.000
2. Tanah Seluas 771 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 106.400.000
3. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
1.325.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/125 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.367.645.750
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 595.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARISH CITYCAR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA VENTURER Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 470.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 75.586.986**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.612.132.736



III. HUTANG

Rp. 2.237.237.670

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.374.895.066

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.